MAKALAH MATA KULIAH

PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

UAS MATA KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Disusun oleh :

Yusrizal Hilmi Sodri 51924131

PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL

FAKULTAS DESAIN

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
1. Jelaskan menurut Anda apa pentingnya mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi! 3
2. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dan nilai demokrasi! 4
3. Sebutkan dan jelaskan Empat (4) landasan pembangunan nasional!..............................5
3.1 Landasan Idiil : Pancasila 5
3.2 Landasan Konstitusional: UUD 1945 5
3.3 Landasan Operasional: GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara)........................5
3.4 Landasan Kultural: Nilai-Nilai Budaya Bangsa 6
4. Salah satu bentuk pendidikan Kewarganegaraan adalah identitas nasional. Berikan pandangan Anda terkait dengan dinamika dan tantangan identitas nasional di Indonesia beserta dengan contoh kasusnya!..6
5. Buat *Resume* Jurnal Kelompok Anda, MINIMAL SATU (1) HALAMAN PENUH. 7
5.1 Judul Jurnal : 7
5.2 Nama Anggota Kelompok...7
5.3 Pendahuluan...7
5.4 Tinjauan Pustaka...8
5.5 Hasil Pembahasan 8
5.6 Kesimpulan & Saran 9
5.7 Daftar Pustaka...9
DAFTAR PUSTAKA..10

1. Jelaskan menurut Anda apa pentingnya mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi!

Pendidikan Kewarganegaraan bukan hanya sekedar mata kuliah wajib di Perguruan Tinggi, tapi juga berperan untuk membentuk karakter, sikap, dan pola pikir mahasiswa agar bisa mendorong mahasiswa menjadi seseorang yang berkontribusi secara konstruktif dalam Masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan tentunya bisa menjadikan mahasiswa sebagai Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Bukan hanya sekedar dipelajari tapi juga diharapkan untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Landasan penting yang bisa menjadikan Pendidikan Kewarganegaraan ini sangat penting di Perguruan Tinggi adalah dari sumber historis, yaitu pembelajaran dari masa lalu. Mahasiswa diajak untuk bisa mengambil hikmah dari kejadian masa lalu dan juga dijadikan pelajaran berharga dalam menjalani masa kini dan masa depan. Selain dari sumber historis dari sisi sosiologis, melalui pendekatan ini mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami struktur dan proses sosial, tapi juga mampu melihat masalah sosial secara kritis dan mampu mencari solusi yang berlandaskan pada nilai kebangsaan.

Pendidikan ini juga dilandasi oleh pendekatan yuridis, yang diharapkan mahasiswa menjadi paham hukum dan peraturan. Dengan memahami itu mahasiswa mampu berkontribusi dan menciptakan kesejahteran sosial yang menjunjung tinggi keadilan. Selain itu Pendidikan ini juga membantu membentuk kesadaran bahwa negara hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, menjamin hak warga negara, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa.

Pendekatan secara politis juga sama pentingnya karena bisa membantu mahasiswa menjadi lebih berpikir secara kritis terhadap dinamika kekuasaan, pengambilan keputusan, dan kebijakan publik. Dengan adanya pemahaman ini mahasiswa diharapkan mampu mewujudkan kehidupan politik yang sehat dan berintegritas dalam pembangunan politik yang demokratis, adil, dan beradab.

Dengan menggabungkan pendekatan-pendekatan tadi, Pendidikan Kewarganegaraan bisa menjadi bekal bagi mahasiswa untuk menjalani peran mereka sebagai warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Mahasiswa menjadi seseorang yang tidak hanya siap dalam dunia kerja, tetapi juga siap membangun bangsa dengan menjunjung nilai-nilai luhur yang telah menjadi dasar kehidupan bernegara.

2. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dan nilai demokrasi!

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat. Dalam sistem ini, rakuyat tidak hanya memiliki hak untuk memilih pemimpin, tapi juga berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi tidak cukup dengan hanya dengan menyelenggarakan pemilu, melainkan harus dijalankan dengan prinsip dan nilai-nilai yang menjamin keadilan, kesetaraan dan melibatkan rakyat.

Di Indonesia demokrasi yang digunakan adalah Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demokrasi yang memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan negara-negara lain, karena tetap mengedepankan musyawarah, gotong royong, dan kepentingan bersama dalam setiap proses politik.

Beberapa prinsip dasar dalam demokrasi antara lain : Demokrasi berdasarkan KetuhananYang Maha Esa, yaitu bahwa segala sesuatu dalam kehidupan bermasyarakat harus sejalan dengan nilai-nilai ketuhanan, menjunjung tinggi moralitas, dan berlandaskan pada norma-norma agama. Ada juga melalui prinsip Demokrasi dengan Kecerdasan yang menekankan bahwa pelaksanaan demokrasi tidak boleh didasarkan semata-mata pada kekuatan massa atau fisik, justru menuntut kecerdasan dalam pengambilan keputusan.

Kemudian ada Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat, di mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan. Selain itu ada juga Demokrasi dengan *Rule of Law*, yang berarti demokrasi dijalankan berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata. Negara wajib menegakkan kebenaran hukum *(legal truth),* memberikan keadilan hukum *(legal justice)*, menjamin kepastian hukum *(legal security),* serta mengembangkan manfaat hukum *(legal interest)* demi keadilan dan kesejahteraan bersama.

Demokrasi Pancasila juga menekankan pentingnya pembagian kekuasaan. Demokrasi menurut Pancasila tidak hanya mengakui kekuasaan negara, tapi juga membaginya ke dalam lembaga-lembaga bertanggung jawab agar menciptakan keseimbangan dan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, demokrasi juga harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, guna menjamin martabat dan derajat kemanusiaan secara utuh.

Prinsip yang lainnya juga ada Pengadilan yang merdeka, di mana semua pihak memiliki hak yang sama untuk mencari dan mendapatkan keadilan tanpa campur tangan kekuasaan

pihak lain. Bersamaan dengan itu, otonomi daerah juga menjadi bagian penting, yang memberi kewenangan bagi daerah untuk mengatur urusannya sendiri sebagai bentuk tanggung jawab pemerintahan.

Lebih lanjut, Demokrasi dengan Kemakmuran juga menegaskan bahwa demokrasi tidak cukup hanya dengan kebebasan berpolitik, tetapi juga harus mampu membangun kesejahteraan rakyat secara merata. Hal ini juga berkaitan dengan Demokrasi yang Berkeadilan, yaitu memastikan bahwa tidak ada golongan yang mendapatkan perlakukan istimewa, sehingga setiap warga negara merasa diperlakukan setara dalam segala aspek.

3. Sebutkan dan jelaskan Empat (4) landasan pembangunan nasional!

3.1 Landasan Idiil : Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bagi bangsa Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila memberikan prinsip dasar yang harus dipegang teguh dalam pembangunan. Misalnya, sila keadilan sosial menekankan perlunya pembangunan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila menjadi pemandu moral agar pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi juga menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.

3.2 Landasan Konstitusional: UUD 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjadi landasan hukum tertinggi yang mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pembangunan nasional. Dalam UUD 1945, khususnya dalam Pembukaan Alinea keempat, ditegaskan bahwa tujuan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan kesejahteraan umum.

3.3 Landasan Operasional: GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara)

Pada masa Orde Baru hingga awal reformasi, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) merupakan panduan strategis pembangunan yang disusun oleh MPR sebagai acuan presiden dalam menyusun program kerja. Setelah amandemen UUD 1945, GBHN tidak lagi diberlakukan. Kini, fungsinya digantikan oleh RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) sebagai

dokumen resmi perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah yang menjadi pedoman operasional pemerintah.

3.4 Landasan Kultural: Nilai-Nilai Budaya Bangsa

Pembangunan harus selaras dengan budaya lokal yang hidup di masyarakat. Indonesia kaya akan tradisi dan kearifan lokal, sehingga pembangunan tidak bisa disamaratakan atau meniru mentah-mentah dari luar. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan saling menghargai jadi kekuatan sosial yang mendukung pembangunan. Dengan memperhatikan budaya, pembangunan bisa lebih diterima masyarakat dan sekaligus menjaga jati diri bangsa di tengah arus globalisasi.

4. Salah satu bentuk pendidikan Kewarganegaraan adalah identitas nasional. Berikan pandangan Anda terkait dengan dinamika dan tantangan identitas nasional di Indonesia beserta dengan contoh kasusnya!

Identitas nasional adalah jati diri bangsa yang menjadikannya beda dari bangsa lain. Terbentuk dari budaya, bahasa, agama, sejarah perjuangan, dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Di Indonesia, keberagaman itu dipersatukan melalui Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai Pancasila. “Setiap bangsa dan Negara memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dengan bangsa dan Negara lain. Hal ini dikenal dengan identitas nasional suatu Negara.”(Kurniasih, n.d., p. 29). Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap negara, termasuk Indonesia, harus menjaga keunikan dan jati dirinya agar tetap kokoh di tengah perubahan zaman.

Namun, di era globalisasi yang terus berkembang, identitas nasional Indonesia menghadapi banyak tantangan. Masuknya arus budaya asing terutama melalui teknologi dan media sosial mengubah cara berpikir masyarakat, terutama kalangan muda. Akibatnya, nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong royong, kebersamaan, dan toleransi mulai tergeser oleh individualis dan gaya hidup konsumtif.

Salah satu wujud nyata dari tantangan ini adalah kecenderungan masyarakat yang lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk dalam negeri. Sikap ini mencerminkan rasa nasionalisme dan patriotisme yang mulai memudar, sebagaimana dijelaskan dalam sumber bahwa masyarakat kini "lebih menghargai dan mencintai bangsa

asing, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri". (Kurniasih, n.d., p. 50). Jika dibiarkan, pola pikir seperti ini bukan hanya merugikan industri lokal, tetapi juga memperlemah identitas bangsa sendiri.

Fenomena ini tidak muncul dengan sendirinya, melainkan dampak dari proses panjang globalisasi yang membuat budaya luar lebih gampang diakses dan sering kali dianggap modern. Produk luar dianggap berkualitas dan bermartabat. Di sisi lain, seringkali produk lokal dipandang buruk karena tidak dipromosikan dengan baik dan rendahnya rasa bangga terhadap produk karya anak bangsa. Upaya memperkuat identitas nasional akan terasa penting dan diharapkan masyarakat, terutama generasi muda, tidak terputus dari budaya yang telah membesarkannya.

Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan berfungsi penting untuk membangun kembali kesadaran nasional. Melalui penguatan nilai-nilai Pancasila, cinta tanah air, dan rasa bangga terhadap budaya serta karya bangsa bangsa, generasi muda diharapkan dapat melestarikan identitas nasional di tengah pengaruh global. Identitas bangsa tidak hanya ditunjukkan melalui simbol-simbol negara, tetapi juga melalui sikap, pilihan hidup, dan dukungan terhadap kepentingan nasional.

5. Buat *Resume* Jurnal Kelompok Anda, MINIMAL SATU (1) HALAMAN PENUH.

5.1 **Judul Jurnal :** Aksi Demonstrasi Buruh yang Menuntut Keadilan Upah di Kota Bandung

5.2 **Nama Anggota Kelompok :** Bimo Shaputra Wahono, Yusrizal Hilmi Sodri, Muhamad Farid Faqih, Zainanda Syakila, Zahra Khairunnisa Mujahidah

5.3 Pendahuluan :

Demonstrasi buruh merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam memperjuangkan hak-haknya, khususnya dalam mendapatkan upah yang layak dan adil. Di Bandung, tindakan-tindakan ini mencerminkan frustrasi terhadap sistem upah yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan sosial. Kritik terhadap sistem upah di Indonesia telah lama disuarakan, salah satunya oleh Zuhdan (2014), yang

menyebut kesenjangan antara upah minimum dan kebutuhan layak sebagai pemicu munculnya gerakan buruh.

Meskipun tindakan-tindakan ini sering terjadi, penelitian yang secara langsung mengaitkan demonstrasi ini dengan sila kelima Pancasila (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) masih terbatas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana tindakan-tindakan ini mencerminkan penerapan nilai keadilan sosial dalam bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor yang mendasari terkait dengan demonstrasi buruh di Bandung dan untuk menganalisis hubungan antara faktor-faktor ini dan penerapan nilai keadilan sosial dalam Pancasila.

5.4 Tinjauan Pustaka :

Beberapa penelitian sebelumnya menjadi dasar analisis:

- **Nihayah & Kusumantoro (2010)** menyatakan bahwa tingkat pendidikan dan keterampilan memengaruhi besar kecilnya upah regional.
- **Wijayanti & Effendy (2023)** menyoroti pelanggaran hak pekerja terkait cuti melahirkan, yang menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap buruh.
- **Indrayani & Muzan (2025)** menekankan ketidaksetaraan gender, lokasi geografis, dan lemahnya pengawasan pemerintah sebagai faktor ketimpangan upah.

Semua kajian tersebut menguatkan bahwa demonstrasi buruh adalah bentuk reaksi terhadap ketidakadilan struktural dalam sistem ketenagakerjaan.

5.5 Hasil Pembahasan :

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk survei dengan sekitar 30 responden dari masyarakat umum di kota Bandung. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar responden mendukung demonstrasi oleh para pekerja sebagai perjuangan yang sah untuk hak-hak mereka, terutama terkait tuntutan upah yang adil.

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk survei dengan 30 responden dari masyarakat umum di kota Bandung. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar responden mendukung demonstrasi oleh para pekerja sebagai perjuangan yang sah untuk hak-hak mereka, terutama terkait tuntutan upah yang adil.

Sebagian besar responden juga percaya bahwa kesenjangan upah yang ada bertentangan dengan keadilan sosial yang terwujud dalam Pancasila, dan pemerintah belum sepenuhnya memenuhi perannya dalam melindungi hak-hak pekerja. Demonstrasi, meskipun didukung oleh mayoritas publik, menimbulkan kekhawatiran tentang ketegangan sosial dan konsekuensi yang bermotivasi politik.

5.6 Kesimpulan & Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa demo buruh di Kota Bandung mempresentasikan cara nyata atas ketidakadilan dalam sistem upah yang dinilai kurang adil. Aksi ini lebih dari sekadar protes ini adalah cerminan dari ketidakadilan sosial yang dialami pekerja yang terhubung langsung dengan nilai-nilai sila kelima dari Pancasila. Dukungan publik untuk tindakan tersebut datang dari keyakinan bahwa itu adalah upaya untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja

Sehubungan dengan temuan tersebut, disarankan pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih terbuka dan melibatkan buruh dalam perumusan kebijakan, khususnya terkait upah dan kesejahteraan pekerja. Sangat penting untuk melibatkan para buruh dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan tujuan dan impian mereka sebenarnya. Selain itu, pengawasan terhadap hukum tentang ketenagakerjaan harus ditingkatkan agar perlindungan terhadap buruh tidak hanya bersifat formalitas. Masyarakat pun diharapkan dapat mendukung perjuangan buruh selama dilakukan secara damai, sebagai bagian dari upaya bersama-sama untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkelanjutan.

5.7 Daftar Pustaka

- Indrayani, E., & Muzan, A. (2025). *Kesenjangan upah dan keadilan sosial dalam sistem pengupahan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Kesejahteraan, 10(1), 37–42.
- Kurniasih, D., & Nengsih, N. S. (2016). *Adjustment of local regulation about formation and structure of local government*. International Conference on Ethics in Governance (ICONEG 2016), 290–294.
- Nihayah, D. M., & Kusumantoro. (2010). *Penentu upah regional: Tenaga kerja terdidik dan tidak terdidik di Indonesia*. JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan, 3(1), 28–39.

- Wijayanti, F. S., & Effendy, D. (2023). *Penerapan hak cuti bagi pekerja pria yang istrinya melahirkan di PT X Kota Bandung*. Bandung Conference Series: Law Studies, 3(1), 806–809.
- Zuhdan, M. (2014). *Perjuangan gerakan buruh tidak sekadar upah: Melacak perkembangan isu gerakan buruh di Indonesia pasca reformasi*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 17(3), 272–290.

DAFTAR PUSTAKA

Kurniasih, D. (n.d.). *Buku Pendidikan Kewarganegaraan*.